



HEDON HINGGA ASUSILA 'KPU TAK LAYAK GELAR PILKADA'

Saat hari H pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 makin dekat, berbagai fakta terkait kelakuan penyelenggaraan pemilu terkuak. kasus pemberhentian eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akibat asusila menjadi sorotan publik. Tak berhenti di situ, Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD mengungkap gaya hidup hedon para komisioner KPU. Dikatakannya, sekarang mereka memakai 3 mobil dinas yang mewah, hingga menyewa jet dengan alasan untuk perjalanan dinas. Walhasil, Guru Besar Hukum Tata Negara tersebut menegaskan, KPU saat ini sudah tidak layak untuk menggelar tahapan Pilkada Serentak 2024. Ia menyarankan perlu adanya pergantian seluruh komisioner KPU tanpa menunda gelaran pesta demokrasi.

Baca di hal 11....

DAFTAR GAJI KETUA DAN ANGGOTA KPU

GAJI ANGGOTA DAN KETUA KPU PUSAT

- 1. Gaji Ketua KPU
Rp 43.110.000,00.
- 2. Gaji Anggota KPU
Rp 39.985.000,00.

GAJI ANGGOTA DAN KETUA KPU PROVINSI

- 1. Gaji Ketua KPU
Rp 20.215.000,00.
- 2. Gaji Anggota KPU
Rp 18.565.000,00.

GAJI ANGGOTA DAN KETUA KPU KAB /KOTA

- 1. Gaji Ketua
Rp 12.823.000,00.
- 2. Gaji Anggota KPU
Rp 11.573.000,00.

BESARAN GAJI PPK, PPS, PANTARLIH, KPSS PILKADA 2024

(Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022, berikut besaran gaji atau honorarium PPK, PPS, Pantarlih, dan KPSS Pilkada 2024.)

1. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

- Ketua: Rp 2.500.000/orang/bulan
- Anggota: Rp 2.200.000/orang/bulan
- Sekretaris: Rp 1.850.000/orang/bulan
- Pelaksana/Staf Administrasi & Teknis: Rp 1.300.000/orang/bulan

2. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

- Ketua: Rp 1.500.000/orang/bulan
- Anggota: Rp 1.300.000/orang/bulan
- Sekretaris: Rp 1.150.000/orang/bulan
- Pelaksana/Staf Administrasi dan Teknis: Rp 1.050.000/orang/bulan

3. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PANTARLIH)

- Rp 1.000.000/orang/bulan

4. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPSS)

- Ketua: Rp 900.000/orang/bulan
- Anggota: Rp 850.000/orang/bulan
- Pengamanan TPS/Satinmas: Rp 650.000/orang/bulan

**Government (Hal.2)
Belanja Bengkak,
APBN Terakhir
Jokowi Diramal
Defisit Rp609 T**



BELANJA BENGGKAK, APBN TERAKHIR JOKOWI DIRAMAL DEFISIT RP609 T



Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR. (ist)

JAKARTA - Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024 membengkak menjadi Rp 609,7 triliun, atau setara 2,7% dari produk domestik bruto (PDB). Mulanya, target defisit tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya Rp 522,8 triliun atau setara 2,29% PDB.

Defisit itu disebabkan belanja negara yang membengkak menjadi sebesar Rp 3.412,2 triliun, atau 102,6% dari target dalam APBN 2024 sebesar Rp 3.325,1%. Sementara itu, pendapatan atau penerimaan negara tetap sesuai dengan target APBN 2024 sebesar Rp 2.802,5 triliun.

"Dengan outlook pendapatan dan belanja tersebut, kami memproyeksikan APBN 2024 akan ditutup dengan defisit dari keseimbangan primer mencapai Rp 110,8 triliun dan defisit total mencapai Rp 609,7 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Senin (8/7/2024).

"Ini artinya terjadi kenaikan defisit dari 2,29% persen ke 2,7% dari PDB," tegas Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, pendapatan negara masih tetap sesuai target karena memang mayoritas tak mencapai target yang ditetapkan dalam APBN 2024. Misalnya, penerimaan pajak hanya 96,6% dari target atau senilai Rp 1.921,9 triliun. Lalu, penerimaan kepabeanan dan cukai 92,5% dari target atau senilai Rp 296,5 triliun.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang masih mampu melampaui target APBN 2024 yakni sebesar Rp 549,1 triliun atau setara 111,6% dari target. Demikian juga penerimaan hibah yang mencapai

8.110,3% atau menjadi Rp 34,9 triliun.

"Kenaikan defisit Rp 80,8 triliun adalah kombinasi dari pendapatan negara yang tadi mengalami beberapa koreksi atau tidak mencapai target maupun kontraksi yang besar dari PNBP, pajak, dan bea cukai," ucap Sri Mulyani.

Meski defisit membengkak, Sri Mulyani memastikan, beban utang pemerintah tidak akan terkerek naik, karena pemerintah lebih memanfaatkan saldo anggaran lebih senilai Rp 100 triliun dari 2022-2023. Penerbitan SBN pun ia perkirakan lebih rendah Rp 214,6 triliun dari pagu 2024.

"Akan dibiayai melalui tambahan penggunaan SAL Rp 100 triliun dan penerbitan SBN tetap lebih rendah. Jadi dalam hal ini meski defisit naik penerbitan SBN tidak naik," tutur Sri Mulyani.

Ekonomi Masih Tak Pasti

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kondisi global pada semester II-2024 masih dipenuhi oleh ketidakpastian. Hal ini dipicu oleh perubahan akibat pemilihan umum (Pemilu) di sejumlah negara, termasuk AS dan kondisi geopolitik yang masih tinggi.

Diakuinya kondisi perekonomian global hingga paruh pertama tahun ini tak kunjung membaik. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi global terus stagnan.

Ia mengatakan, penyebab ekonomi global stagnan ialah permasalahan konflik geopolitik yang tak kunjung selesai. Ditambah dengan gejolak Pemilu di berbagai negara maju hingga

belum pulihnya rantai perdagangan global akibat perang tarif yang dipicu over produksi industri di China.

"Pertumbuhan ekonomi dunia masih stagnan rendah, ini juga merupakan pertumbuhan ekonomi terlemah dalam sedekade kecuali pada 2020 saat pandemi dan belum ada perubahan dari tahun lalu 3,2%," ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, masih stagnannya pertumbuhan ekonomi global itu juga dipicu oleh tren suku bunga kebijakan bank sentral negara maju yang masih sangat tinggi, khususnya Bank Sentra AS, yakni The Federal Reserve atau The Fed yang masih sulit menurunkan tingkat inflasinya.

Tingginya tren suku bunga acuan The Fed itu kata Sri Mulyani telah menyebabkan nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar AS, hingga pergerakannya terus di atas asumsi makro untuk kurs rupiah yang hanya Rp 15.000. Saat ini rupiah terus bergerak di atas Rp 16.000/US\$.

"Inflasi masih keras kepala di sana belum turun. Ini sebabkan kalau dulu komoditas sekarang faktornya satu biaya sewa dan kedua upah tenaga kerja yang terjadi di negara maju sehingga faktor inflasi belum turun meskipun komoditas sudah bergerak turun," tutur Sri Mulyani.

Ia pun menekankan, permasalahan ekonomi global itu tentu akan mempengaruhi kondisi domestik. Mulai dari merosotnya neraca perdagangan hingga penerimaan negara terutama dari sisi penerimaan perpajakan.

"Oleh karena itu kita harus selalu waspada dalam mengelola APBN kita

dan perekonomian kita karena dengan adanya hubungan antar negara dan sentimen yang muncul di pasar uang dan pasar surat berharga menimbulkan juga dampak ke perekonomian kita," tegasnya. (wid,rls,ist,cnbc/dya)

TARGET DEFISIT APBN 2024

- Diramal membengkak menjadi **Rp 609,7 triliun, atau setara 2,7%** dari produk domestik bruto (PDB)
- Target awal hanya **Rp 522,8 triliun atau setara 2,29%** PDB.

PEMICU DEFISIT

- Belanja negara yang membengkak **menjadi sebesar Rp 3.412,2 triliun, atau 102,6%** dari target dalam APBN 2024 sebesar **Rp 3.325,1%**.
- Pendapatan atau penerimaan negara tetap sesuai dengan **target APBN 2024 sebesar Rp 2.802,5 triliun**.

DPR Akui Sudah Terima Surpres RUU TNI dan Polri

DAFTAR PASAL KRUSIAL REVISI UU TNI DAN POLRI

RUU TNI

Batas usia pensiun jadi 60-65 tahun

- Draft revisi UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 memperpanjang usia pensiun menjadi 60 tahun bagi perwira dan 58 tahun bagi bintang serta tamtama. Pasal 53 Ayat (2) memungkinkan prajurit dengan jabatan fungsional dinas hingga 65 tahun.

Prajurit aktif bisa duduk di kementerian negara

- RUU TNI memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan di kementerian atau lembaga negara, sesuai Pasal 47 Ayat (2). Terdapat 10 bidang yang dapat diisi prajurit TNI aktif, dengan peluang di luar 10 bidang tersebut jika keahliannya dibutuhkan.

- "Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden."

RUU POLRI

Batas pensiun anggota polisi naik jadi 60-65 tahun

- RUU Polri menaikkan batas usia pensiun anggota Polri menjadi 60 tahun, 65 tahun untuk jabatan fungsional, dan 62 tahun bagi anggota dengan kemampuan khusus.

- "(3) Usia pensiun bagi Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian dapat diperpanjang sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun," tulis Pasal 30 ayat (3).

Usia pensiun Kapolri bisa diperpanjang lewat Keppres

- RUU Polri juga mengatur batas usia pensiun Kapolri dapat diperpanjang lewat Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapat pertimbangan dari DPR.

Polisi bisa awasi dan blokir ruang siber

- RUU Polri juga akan memperluas kewenangan Polri dalam melakukan pengamanan, pembinaan dan pengawasan terhadap ruang siber. Aturan baru ini diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf b yang berbunyi: "Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengamanan Ruang Siber."

Bisa melakukan penyadapan

- RUU Polri memberi wewenang polisi untuk melakukan penyadapan, dengan syarat tugas tersebut harus sesuai dengan UU tentang Penyadapan. "Melakukan penyadapan dalam lingkup tugas kepolisian sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang penyadapan," demikian bunyi Pasal 14 ayat 1 huruf a dokumen draf RUU Polri, dikutip Selasa (28/5).

Mengalangi intelijen

- RUU Polri memberi wewenang polisi untuk melaksanakan kegiatan intelijen keamanan (Intelkam), termasuk pemeriksaan aliran dana dan penggalan informasi.



Aliansi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menggelar demonstrasi dalam rangka menolak revisi Undang-undang (UU) Polri di kawasan Car Free Day (CFD), Jakarta, pada Minggu (30/6/2024). (Dok)

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya telah menerima surat presiden (surpres) untuk RUU Kementerian Negara, RUU TNI, RUU Polri, dan RUU Keimigrasian.

"Sudah masuk, ada empat surpres yang sudah masuk. UU Kementerian Negara, UU TNI, UU Polri, UU Imigrasi," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Namun, kata Dasco, DPR masih menunggu Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari pemerintah. Dasco mengatakan pembahasan lebih lanjut tak hanya bisa bermodalkan surpres tanpa adanya DIM.

"Ya kan kita kalau surpresnya udah tapi DIM-nya belum kan kita belum tahu apa yang diubah atau keberatan sama pemerintah atau yang dikoreksi begitu," ucapnya.

Sebelumnya, DPR lewat Rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang V Tahun 2023-2024 mengesahkan keempat RUU tersebut menjadi usul inisiatif DPR.

Pengesahan keempat RUU ini jadi usul inisiatif DPR sebagai lanjutan dari rapat Panja yang digelar di Badan Legislasi sebelumnya. Seluruh fraksi sepakat untuk membawa kedua RUU itu ke Rapat Paripurna.

Namun untuk RUU Kementerian, Fraksi PKS menerima dengan catatan. Sementara delapan fraksi lainnya sepakat. Pasal 15 UU 39/2008 yang mengatur batas maksimal jumlah kementerian sebanyak 34 sepakat untuk diubah.

Dalam draf RUU yang disepakati Baleg, jumlah maksimal itu dihapus, jumlah kementerian disesuaikan dengan kebutuhan presiden

memerhatikan aspek efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Bisa Lemahkan Pengawasan Rakyat

Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai ada lima revisi undang-undang (RUU) yang menyelak atau tidak masuk dalam program prioritas nasional (prolegnas), namun kini dibahas oleh DPR RI di akhir periode masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Lima beleid tersebut yakni RUU Polri, RUU TNI, RUU Mahkamah Konstitusi (MK), RUU Kementerian Negara, dan RUU Penyiaran.

"Kita tahu undang-undang yang nyelak di ujung masa pemerintahan Jokowi ini banyak loh. Misalnya saja UU Kementerian Negara, itu nyelak, sebenarnya enggak ada dalam prioritas tahun ini, tapi dibilangnya putusan MK. UU MK juga lumayan nyelak, dan lain sebagainya," kata Bivitri dikutip dari YouTube PSHK Indonesia.

Menurut Bivitri, politik hukum dalam kelima RUU itu memang tidak terlihat secara gamblang memperlihatkan langsung dampak apa saja yang ditimbulkannya.

Namun, kata Bivitri, jika dibaca secara seksama dan mendalam, paling tidak 5 RUU itu didesain untuk meminimalkan pengawasan terhadap kekuasaan.

"Paling tidak 5 undang-undang itu didesain untuk meminimalkan pengawasan terhadap kekuasaan. Mulai dari Kepolisian, TNI, karena kita tidak bicara dwifungsi ABRI seperti dulu tapi multifungsi. Kata panglima himself, multifungsi," ujar dia.

Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) ini menambahkan, RUU Polri yang ada saat ini tidak mengakomodir soal reformasi yang memang di butuhkan oleh instansi Koprs Bhayangkara itu sendiri. Begitu juga dengan RUU MK dan RUU TNI yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan reformasi yang diperlukan.

"Revisi UU MK itu justru untuk mengintervensi hakim supaya apa yang dilakukan selama ini jadi legal. Jadi melegalkan apa yang sebenarnya salah," kata Bivitri.

Lalu, Bivitri menambahkan soal RUU Penyiaran yang dinilai akan berdampak pada kebebasan berekspresi. "Kemudian RUU Kementerian negara juga gitu, untuk kue-kue kekuasaannya lebih mudah dibagi karena tidak ada pembatasan," ujar dia.

Lebih lanjut, ia menjelaskan proses legislasi seharusnya melalui proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Hal ini juga diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut dia, kelima RUU tadi tidak melalui proses perencanaan dan tidak ada dalam prolegnas DPR RI tahun ini. "Dengan kerangka itu semua legislasi harus melalui proses perencanaan dulu. Biasanya kalau enggak ada di prolegnas ya enggak bisa dibahas," ujarnya.

"Kadang-kadang mereka (anggota DPR) kan pakai dalilnya yang diizinkan untuk nyelak tuh, putusan MK atau perjanjian internasional. Kadang-kadang putusan MK enggak ada kaitannya dengan apa yang direvisi tapi dijadikan alasan," imbuh dia. (Atri,wid,ist,rls/dya)

17 Pegawai KPK Diduga Bermain Judi Online

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan ada pegawainya yang terlibat judi online. Penelusuran oleh Inspektorat sudah dilakukan di internal.

"KPK telah memperoleh informasi terkait judi online yang diduga melibatkan beberapa pegawai," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika kepada wartawan melalui keterangan tertulisnya, Senin (8/7/2024).

Tessa belum memerinci para pegawai tersebut. Namun, penelusuran juga menyebut beberapa di antaranya ternyata pihak dari internal.

"Penelusuran awal oleh Inspektorat menemukan ada beberapa nama yang bukan pegawai KPK," tegasnya.

"Inspektorat masih terus mengumpulkan bahan keterangan terkait laporan tersebut, untuk tindak lanjut berikutnya," sambung juru bicara berlatar belakang penyidik tersebut.

Terpisah, Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango membenarkan ada pegawainya yang bermain judi online. Terdapat sekitar 17 pegawai KPK yang terlibat judi online tersebut.

"Ya, tapi ternyata sebagian tidak lagi di kami, sudah berhenti," kata Nawawi. Nawawi mengatakan pegawai yang terlibat dalam permainan judi online itu di antaranya sopir hingga keselamatan. Namun, ia enggan menjelaskan berapa jumlah dan bagaimana proses penindakan para petugas tersebut.

"Kami sudah memerintahkan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan. Tapi kalau tidak, itu belum bisa dibuka," katanya.

Informasi yang beredar, 17 pegawai KPK itu judi online pada 2023. Nilai



Warga berjalan di depan spanduk sosialisasi larangan judi online di Kantor Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. (ANTARA)

deposito untuk judi online dari ke-17 pegawai itu mencapai Rp 115 juta.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengatakan Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online sudah mulai bekerja. Dia menyatakan Satgas telah menyerahkan nama-nama pegawai pemerintah yang terlibat judi online ke kementerian dan lembaga masing-masing.

"Sampai kemarin kami terus melakukan kegiatan yaitu mendistribusikan nama-nama, baik pemerintahan atau lembaga yang terlibat judi online," kata Hadi dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

OJK: Bank Blokir 6.056 Rekening

Terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae

menyampaikan perbankan telah melakukan pemblokiran terhadap 6.056 rekening yang terindikasi dengan aktivitas judi online/daring dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

"OJK juga meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam Customer Identification File (CIF) yang sama," ujar Dian dalam konferensi pers Hasil RDK Bulanan Juni 2024 di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Hingga Juni 2024, Dian mengatakan bahwa OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran lebih dari 7 ribu rekening yang terindikasi terkait dengan perjudian online.

OJK juga meminta kepada bank untuk melakukan profiling yang hasilnya dikirimkan ke sistem administrasi bernama SIGAP. Nantinya, antar-bank juga akan saling

bertukar data terkait rekening yang digunakan transaksi judi online.

Sebelum Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 diterbitkan, menurut Dian, OJK sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah pemblokiran.

Kini dengan adanya Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online, langkah-langkah menjadi lebih terkoordinasi sehingga bisa menutup segala jalur kemungkinan yang menopang transaksi perjudian online.

"Tentu dari kita, pemblokiran ini akan terus dilakukan oleh kita. Ini sesuai dengan kewenangan kita. Di samping itu juga melakukan kampanye massal itu, apakah itu secara bersama-sama atau masing-masing bank kepada para nasabahnya terutama kepada publik secara keseluruhan," jelas Dian.

Pada beberapa waktu yang lalu, ujar Dian, OJK telah mengirim surat kepada bank-bank dan meminta mereka untuk memperkuat sistem pengawasannya terhadap transaksi-transaksi judi online serta perilaku nasabah yang melakukan jual-beli rekening.

OJK meminta bank untuk melakukan beberapa penguatan, salah satunya memperkuat fungsi satuan kerja dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) yang diharapkan dapat menjadi satuan kerja pemberantasan tindak pidana ekonomi, termasuk judi online, fraud dan lain sebagainya.

Kemudian, OJK meminta bank untuk mengintensifkan upaya meminimalisir terjadinya jual-beli rekening. Hal ini, ujar Dian, tentu terkait dengan masalah edukasi publik yang harus dilakukan oleh perbankan kepada para nasabahnya serta edukasi mengenai hak dan kewajiban nasabah ketika mendapatkan rekening bank.

OJK juga mengharapkan agar bank mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (IT) dalam mengidentifikasi tindak kejahatan ekonomi, termasuk judi online.

Dengan transaksi judi online yang banyak setiap harinya melalui rekening bank, ujar Dian, tentu sistem IT yang akan menjadi andalan pemberantasan judi online ke depan.

"Kita sudah sepakat untuk terus meningkatkan kampanye secara masif di seluruh perbankan, termasuk tadi juga ada asosiasi BPR, asosiasi Bank Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) juga hadir melalui Zoom, terkait dengan bagaimana bahaya dan konsekuensi perjudian judi online ini," kata Dian. (wid,rls,ist,tro/dya)

Jumlah Pemain Judi Online yang Terdeteksi di Indonesia Berdasarkan Kelompok Usia (Juni 2024)



Kasus Pembunuhan Vina Cirebon Status Tersangka Pegi Gugur

BANDUNG-Status tersangka Pegi Setiawan, dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, gugur dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada Senin (8/7/2023).

Hal itu setelah dikabulkannya permohonan praperadilan yang diajukan Pegi oleh hakim. Hakim menyatakan bahwa status tersangka Pegi tidak sah.

"Mengadili: Satu, mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya.

Dua menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon [...] atas nama Pegi Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Tiga menyatakan tindakan pemohon menetapkan termohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana Perlindungan Anak dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan [...] adalah tidak sah dan tidak berdasarkan proses hukum. Empat menetapkan surat ketetapan tersangka [...] batal demi hukum," ujar putusan hakim.

Selanjutnya, Limamenyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon

Enam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan perintah penyidikan terhadap pemohon

"Tujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan.

Delapan, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sediakala," lanjut putusan itu.

Salah satu yang menggugurkan adalah Pegi belum diperiksa oleh polisi pada saat ia ditetapkan tersangka.

"Menurut hakim, penetapan tersangka tidak hanya 2 alat bukti yang cukup tapi harus ada pemeriksaan sebagai calon tersangka terlebih dahulu oleh termohon (polisi)," kata hakim tunggal PN Bandung, Eman Sulaeman.

"...maka menurut hakim penetapan status tersangka oleh termohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum," kata hakim.

Suasana sidang pun menjadi riuh, penonton bertepuk tangan. Hakim pun mengingatkan pengunjung untuk tertib. Ia pun melanjutkan.

"Dengan demikian petitum dalam permohonan praperadilan oleh pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya," ujar hakim.

Pegi sebelumnya disangkakan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1



Pegi Setiawan keluar dari ruang tahanan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jabar, Senin (8/7/2024)

ke-1 KUHP dan Pasal 81 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan diancam dengan pidana mati.

Pihak Pegi pun mengajukan praperadilan terkait status tersangkanya. Sidang praperadilan ini digelar sejak 1 Juli 2024.

Terpisah, Sukaesih, Ibunda mendiang Vina mengaku menghormati putusan Hakim, jika Pegi akhirnya dibebaskan dari status tersangka.

Terkait siapa pelaku pembunuhan Vina dan Eky, Sukaesih mendesak polisi segera menangkap 3 orang yang dinyatakan DPO. Diketahui mereka adalah Pegi alias Perong (30), Andi (31), dan Dani (28).

Apa Kata Kapolri?

Dengan batalnya status tersangka Pegi Setiawan, bagaimana kelanjutan kasus 'Vina Cirebon'?

"Ya, tentunya itu akan dialami, ya. Didalami isi dari keputusan tersebut apa, karena ini, kan, terkait dengan sah tidaknya martabat sebagai tersangka dan mungkin hal-hal lain," kata Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Sigit mengaku masih belum mengetahui isi lengkap putusan praperadilan. Yang jelas, kelanjutan kasus 'Vina Cirebon' menunggu pendalaman putusan praperadilan.

"Saya juga belum tahu isinya apa. Tapi yang jelas akan segera ditindaklanjuti," ungkapnya.

Sigit juga menghormati hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memutuskan mengabulkan praperadilan Pegi.

"Ya, tentunya kita harus menghormati putusan pengadilan. Saya kira dan juga disampaikan oleh Polda Jawa Barat, ya, melalui Kabid

Humasnya untuk langkah selanjutnya tentunya akan menunggu hasil lampiran dari keputusan ataupun tembusan dari keputusan tersebut. Jadi supaya bisa ditindaklanjuti," pungkasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri memastikan tak akan mengambil alih penanganan kasus pembunuhan pasangan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana alias Eky di Cirebon pada 2016 silam. Penyidikan kasus tersebut tetap dilakukan oleh Polda Jawa Barat.

"Kalau penanganan ini tentu saja masih kita percayakan pada Polda Jabar untuk menangani karena di sana juga ada penyidik-penyidik," kata Dirditpidum Bareskrim Polri, Djuhandani Rahardjo Puro, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Sejauh ini, Djuhandani menjelaskan pihaknya tetap memberikan asistensi dalam penyidikan kasus tersebut.

"Walaupun kami sudah asistensi, tentu saja asistensi ini kan menyangkut berbagai aspek. Aspek penyidikannya, ataupun aspek yang berkembang di masyarakat yang tentu saja kita dalam," jelas dia.

Bangga ke Hakim Eman

Tugas Eman Sulaeman menyidangkan perkara Pegi Setiawan dalam gugatan praperadilan ternyata membanggakan warga Karawang, Jawa Barat.

Eman lahir di Karawang pada 10 April 1975 di Desa Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur. Semasa kecil, Eman bersekolah di Karawang sebelum melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Pasundan (Bandung), Jurusan Ilmu Hukum, dan lulus di tahun 1999.

Kerabat Eman, Mohammad Chatta (64 tahun), mengatakan sejak mengetahui bahwa Eman adalah hakim praperadilan Pegi, banyak

PERJALANAN KASUS

PEGI SETIAWAN

● Pegi Ditetapkan Sebagai Tersangka Pembunuhan Vina dan Eky

Kasus penangkapan Pegi ini bermula setelah kisah kematian Vina dan Eky delapan tahun lalu diangkat menjadi film dan meraih jutaan penonton. Disebutkan hingga kini masih ada tiga orang pembunuh Vina dan Eky yang masih buron. Ketiganya adalah Dani, Andi dan Pegi alias Perong. Hingga kemudian pada 21 Mei 2024 Polda Jawa Barat mengumumkan telah menangkap Pegi Setiawan. Pegi dituding sebagai satu dari tiga buronan kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eky. Setelah penangkapan Pegi, polisi kemudian menyatakan buronan kasus ini hanya satu.

● Polisi Sebut Pegi Sempat Ganti Nama Jadi Robi

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat Komisaris Besar Jules Abraham Abast menuturkan bahwa Pegi Setiawan alias Perong merupakan otak dari kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eky di Cirebon, sempat berganti nama menjadi Robi.

● Pegi Berkali-kali Bantah Bunuh Vina

Saat dihadirkan dalam konferensi pers di Polda Jawa Barat, Minggu 26 Mei 2024, Pegi menyangkal terlibat dalam kasus Vina Cirebon dan menyatakan bahwa dirinya korban fitnah. "Saya bukan otak pembunuhan, saya bukan otak pembunuhan itu. Saya rela mati," kata Pegi.

● Pegi Menang Praperadilan

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaeman menyatakan bahwa penetapan Pegi sebagai tersangka oleh dianggap bermasalah dan tidak sah secara hukum. Dalam putusannya, Eman menyoroti kesalahan prosedur yang dilakukan Polda Jawa Barat dalam penetapan Pegi sebagai tersangka.

warga yang sering menggelar nonton bareng (nobar) persidangan tersebut melalui siaran langsung media.

"Jelas sejak kejadian ini viral, di kampung ramai, merasa bangga ada warga asli Kaum Jaya muncul di televisi nasional, hampir tiap hari. Terakhir tadi pagi warga pada nobar. Ada kebanggaan bagi warga yang berhasil dalam kariernya," kata Chatta kepada kumparan, Senin (8/7/2024).

Menurut Chatta, putusan hakim Eman mengabulkan gugatan praperadilan Pegi tentu disambut positif seluruh warga. "Sesuai harapan kita semua," katanya.

Adapun jika putusan ini sampai berimbas pada keamanan hakim Eman dalam menjalankan profesinya, ia pastikan warga lingkungannya akan mengawal hakim Eman. "Hakim, kan, wakil Tuhan. Kalau keamanannya sampai terancam, kami pasti akan mengawal beliau," ujar Chatta. (tro.wid.ant/dya)

Desa Bulukerto Kota Batu Didukung Kembangkan Kopi Arabica Lereng Arjuno

BATU - Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, mulai menunjukkan potensi unggulannya. Kini pengembangan kopi Arabica di lereng Gunung Arjuno digencarkan.

Penjabat (Pj) Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, memuji semangat warga dalam memanfaatkan lahan yang tidak hanya meningkatkan produktivitas tanah, tetapi juga berdampak positif pada perekonomian masyarakat.

Dalam panen perdana kopi Arabica pada Senin (8/7/2024), Aries menekankan penanaman kopi dengan sistem tumpang sari ini tidak hanya menghasilkan kopi dengan cita rasa khas, tetapi juga mampu mencegah erosi dan bencana alam.

"Ini sudah kita canangkan di tahun lalu. Dengan menanam kopi, tanah lebih produktif dan dapat mencegah terjadinya banjir dan longsor dengan mekanisme tumpangsari," ungkap Aries.

Aries mengatakan, sistem pertanian tumpang sari yang diterapkan di lahan seluas 2.500 meter

persegi milik anggota BUMDesma Desa Bulukerto ini, berhasil menghasilkan kopi dengan rasa yang unik dan khas, berbeda dari kopi daerah lain.

Menurutnya, hal ini menjadikan kopi Bulukerto yang tumbuh di lereng Gunung Arjuno memiliki ciri khas tersendiri.

"Selain manfaat ekologisnya, penanaman kopi ini juga berdampak positif pada perekonomian masyarakat. Tingginya harga kopi dan peluang pasar yang luas, baik di dalam maupun luar negeri, membuat budidaya kopi menjadi prospek ekonomi yang menjanjikan," paparnya.

Diketahui, produk kopi dari Desa Bulukerto telah ditawarkan di pasaran dalam berbagai bentuk, baik bubuk maupun biji kopi hijau (green bean). Untuk varian kopi bubuk, dijual dengan harga Rp 20.000 per 100 gram dan Rp 40.000 per 200 gram. Sementara itu, green bean dibanderol seharga Rp 350.000 per 5 kilogram.

Dalam hal ini, Aries berharap kopi

dapat menjadi produk unggulan Kota Batu. Lebih dari itu, ia ingin lahan kopi di Kota Batu menjadi daya tarik wisata yang dapat meningkatkan jumlah wisatawan ke daerah tersebut.

"Kita berharap lahan kopi ini akan menjadi destinasi wisata baru yang semakin meningkatkan jumlah wisatawan ke Kota Batu," ujarnya.

Lebih lanjut, Aries menyampaikan agar keberhasilan inisiatif di Desa Bulukerto ini, diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kota Batu untuk mengembangkan potensi lokalnya. Sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian yang berkelanjutan.

Selain itu, menurutnya Pemerintah Kota Batu juga berencana untuk mempromosikan kopi Bulukerto



Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, saat memanen biji kopi Arabica di Desa Bulukerto. (Dok. Prokopim Kota Batu)

melalui berbagai acara dan festival kopi. Yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas akan keberadaan dan kualitas kopi dari lereng Gunung Arjuno, serta menarik minat para pengusaha dan investor di sektor kopi. (Santi/Dya)

Keluarga Diminta Jujur, Akurasi Data Adminduk Difabel Kota Malang Masih 'Selegenje'



Proses perekaman adminduk bagi penyandang berkebutuhan khusus di Kota Malang. (Dok. Dispendum Kota Malang)

MALANG - Akurasi data administrasi kependudukan (Adminduk) bagi penyandang difabel di Kota Malang masih 'selegenje'. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang, Dahliana Lusi Ratnasari, mengimbau keluarga penyandang kebutuhan khusus untuk dapat jujur mengisi data diri lengkap saat perekaman adminduk.

Lusi mengatakan, ketidaklengkapan informasi dari keluarga seringkali membuat data yang tercatat

tidak sesuai dengan kondisi riil. Mengakibatkan ketidakcocokan data dan potensi terhambatnya penyaluran bantuan serta layanan khusus bagi para penyandang kebutuhan khusus.

"Jadi kalau tidak ada informasi dari keluarga, otomatis data yang masuk ke kami itu (keterangannya) normal, bukan penyandang kebutuhan khusus," ujar Lusi, saat dikonfirmasi awak media, Senin (8/7/2024).

Dijelaskan oleh Lusi, keluarga seharusnya memberikan informasi yang benar pada formulir F-1.01 yang telah disediakan sewaktu perekaman adminduk. Dalam formulir tersebut, menurutnya terdapat bagian yang bisa diisi sesuai kondisi riil, seperti tunanetra atau cacat anggota badan.

Menurutnya, orang tua atau saudara dari anak berkebutuhan khusus yang telah menginjak usia 17 tahun, tidak perlu ragu untuk mengisi data diri sesuai kondisi yang ada, karena data tersebut dirahasiakan oleh Dispendukcapil.

"Kami selalu jemput bola, biasanya memang ada komunitas atau forum difabel yang meminta kami untuk melakukan perekaman," tambahnya.

Lusi menyebutkan, ketidaklengkapan data berdampak pada ketidakcocokan saat permintaan data oleh instansi lain, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Sosial (Dinsos). Menurut Lusi, hal ini menyebabkan berbagai layanan khusus, yaitu kegiatan pendampingan, atau bantuan untuk difabel tidak tersampaikan dengan baik.

"Misalnya ada anggaran khusus untuk bantuan warga tunanetra dari Dinsos, data yang diminta ke kami bisa tidak sesuai jika tidak diisi lengkap," jelas Lusi.

Lebih lanjut, Lusi mengakui memang terdapat perbedaan yang cukup mencolok dalam data kebutuhan khusus antara Dispendukcapil dan Dinsos. Meskipun tidak dapat menyebutkan angka pasti, Lusi menegaskan data difabel lebih banyak tercatat di Dinsos.

"Kami sering berkoordinasi dengan Dinsos untuk menyesuaikan data. Dinsos pun sebenarnya terbatas karena yang lebih luas itu dari Dispenduk. Tapi ya itu tadi, masih ada orangtua atau saudara yang tidak

memberikan informasi yang sebenarnya," paparnya.

Untuk mengatasi hal ini, menurut Lusi, petugas lapangan dari Dispendukcapil telah dilibatkan langsung untuk memastikan data tersebut tercatat secara akurat, bahkan jika keluarga tidak melengkapi formulir dengan lengkap. (Santi/Dya)



Jadi kalau tidak ada informasi dari keluarga, otomatis data yang masuk ke kami itu (keterangannya) normal, bukan penyandang kebutuhan khusus,"



DAHLIANA LUSI RATNASARI

Kepala Dispendukcapil
Kota Malang,



RALINE SHAH

antara Film, Lukisan, dan Jualan Jamu

ADA begitu banyak seniman dengan karya yang begitu beragam pula. Namun, masyarakat mengenal dan mengetahui sebagian kecil saja.

Industri kreatif termasuk di bidang perfilman memiliki peluang untuk "memamerkan" seniman dengan menampilkan lukisan mereka menjadi bagian dari properti produksi.

Raline Shah mengemukakan hal itu, di saat mengunjungi ruang pameran Bale Banjar Sangkring, Yogyakarta, Kamis (27/6/2024) sore.

"Masih sedikit produksi film yang menggunakan latar lukisan asli. Bahkan, untuk menambah desain interior tidak jarang digunakan cetakan lukisan," ujar Raline, aktris yang lahir di Jakarta, 4 Maret 1985.

Sore itu, Raline menikmati beberapa judul pameran lukisan yang digelar bersamaan di Sangkring Art Space di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.

Kebetulan di salah satu galeri, Bale Banjar Sangkring, sedang digelar pameran rutin setahun sekali, Yogya Annuar Art ke-9. Pameran itu bertajuk, Suara-suara, dengan menampilkan karya 55 seniman.

Ditampilkan pula pameran tunggal Edi Sunaryo bertajuk sama, Suara-suara, di galeri berikutnya. Sekurangnya ada 16 lukisan seperti dilampirkan di dalam katalog pameran mantan dosen Jurusan Seni Murni Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta tersebut.

Masih ada dua pameran lagi di Sangkring. Keduanya ditampilkan di galeri yang terpisah di kawasan Sangkring yang cukup luas tersebut.

Di galeri yang paling depan diselenggarakan pameran bersama Sanggar Dewata Indonesia bertajuk, "Kama Chitra". Kemudian di pelataran luar ruang digelar karya trimatra sebagai pameran tunggal Anggar Prasetyo, bertajuk "Life Balance #15".

"Ada satu lukisan yang membuat saya tertarik. Insyallah saya ingin membelinya," kata Raline, yang pernah masuk menjadi 3rd runner up Puteri Indonesia 2008.

Lukisan yang dimaksud, karya Erica Hestu Wahyuni, yang berjudul, Arunika Asasta, yang dipajang sebagai salah satu peserta YAA di Bale Banjar Sangkring. Lukisan ini dengan media cat akrilik di atas kanvas dan di atas

papan pigura kayu jati yang memiliki ukuran 127 kali 127 sentimeter.

Di tengah bidang kanvas ada figur seorang perempuan berkebaya dan berselendang berwarna pink atau merah jambu dengan warna yang terang menyala. Raline sangat menyukai figur perempuan yang tampak anggun itu.

Raline mengawali karier sebagai model paruh waktu di Singapura sejak 2004. Ia masuk dunia peran 2012 dengan turut bermain di film berjudul, 5 cm, disutradarai Rizal Mantovani. Raline lalu terjun ke film-film berikutnya.

"Saat ini belum ada rencana bermain film lagi. Saya menyibukkan diri dengan membuka klinik herbal di Bali," kata Raline.

Ternyata Raline sudah menjalankan usaha klinik herbal itu selama tujuh tahun. Saat ini Raline memiliki tiga klinik herbal di Ubud, Canggu, dan Uluwatu.

"Di klinik itu, saya jualan jamu, Bu," ujar Raline, ketika menjawab pertanyaan Jenni Vi Mee Yei, pemilik dan pengelola Sangkring bersama suaminya, Putu Sutawijaya.

Profil

Mengawali kariernya di ajang pemilihan Putri Sumatera Utara, mengantarkan Raline Shah ke dunia artis. Namanya pun menghiasi layar lebar Indonesia.

Raline Shah dikenal sebagai aktris tanah air berparas cantik. Ia telah memerankan beberapa film Indonesia. Namanya melesat saat membintangi film "5 cm" sebagai Riani pada tahun 2012.

Wanita kelahiran Jakarta, 4 Maret 1985 ini tumbuh besar di Medan, Sumatera Utara. Ia memiliki darah campuran Sumatera dan Malaysia dari sang ayah, Ramat Shah. Keluarga Raline juga dapat dikatakan sebagai keluarga terpandang. Sang ayah merupakan diplomat, pengusaha, mantan anggota MPR dari Sumatera Utara, dan konsul Kehormatan Turki di Medan.

Raline dikenal piawai

bernyanyi dan fasih berbahasa Inggris dan Prancis. Kemahirannya berbahasa asing ini, ia diminta bekerja di Kedubes RI sebagai MC for Tourism Event. Pada 2004, saat berusia 19 tahun, pemilik nama lengkap Raline Rahmat Shah ini mendapat penghargaan Gold International Youth Award.

Karier Raline di dunia hiburan dimulai setelah ia terpilih sebagai

Putri Sumatera Utara dan Putri Indonesia Favorite pada tahun 2008. Wanita lulusan dari National University of Singapore ini pun mulai mendapat banyak tawaran mulai dari bintang iklan hingga menjadi MC program "Kitchen Beib" yang tayang di Global TV.

Raline pun terjun ke dunia akting. Ia mendapat kesempatan bermain sebagai Riani dalam film "5 cm" yang diadaptasi dari novel yang berjudul sama. Film yang dirilis 12 Desember 2012 ini terbilang sukses dengan meraih 2.3 juta penonton.

Selang setahun, Raline kembali bermain dalam trilogi "99 Cahaya di Langit Eropa" sebagai Fatma bersama Acha Septriasa, Abimana Aryasatya, dan Dewi Sandra. Film drama religi ini juga diangkat dari novel karya Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra yang berkisah tentang pencarian cahaya Islam di tanah Eropa yang dibawa oleh bangsa Turki di era Merzifonlu Kara Mustafa Pasha dari Kesultanan Utsmaniyah (Kompas/Viva)



Masih sedikit produksi film yang menggunakan latar lukisan asli. Bahkan, untuk menambah desain interior tidak jarang digunakan cetakan lukisan,"

INI 5 TANDA REMATIK YANG BISA DILIHAT DI KUKU

REMATIK atau rheumatoid arthritis adalah masalah autoimun yang diakibatkan peradangan sistemik pada tubuh.

Pada umumnya, penyakit itu disebabkan oleh berbagai hal, seperti adanya kombinasi faktor gen dan faktor lingkungan. Jika seseorang memiliki suatu varian gen tertentu, kerentanan seseorang terhadap penyakit rematik dapat meningkat.

Orang yang mengalami rematik biasanya akan mengalami sejumlah gejala, mulai dari nyeri sendi dan otot, gampang lelah, hingga mengalami penurunan berat badan. Selain gejala tersebut, Anda juga dapat mendeteksi rematik melalui perubahan pada penampilan kuku.

1. Sindrom kuku kuning

Menurut jurnal *Yellow Nail Syndrome in Rheumatoid Arthritis: An Aetiology Beyond Thiol Drugs*, sindrom kuku kuning memiliki kaitan dengan berbagai penyakit ganas dan penyakit autoimun. Salah satunya, rematik. Adapun rheumatoid arthritis atau rematik menjadi penyebab paling umum yang terjadi pada orang yang menderita masalah autoimun.

Sindrom kuku kuning adalah kondisi saat kuku menjadi lebih tebal, kuning, dan mengalami perlambatan pertumbuhan.

Perubahan warna pada kuku itu terjadi karena akumulasi cairan di jaringan sekitar kuku akibat peradangan kronis.

2. Muncul garis coklat (splinter hemorrhages)

Selain mengalami sindrom kuku

kuning, bagian bawah kuku dari orang yang menderita rematik umumnya akan tampak garis-garis merah atau coklat. Kondisi ini disebut sebagai splinter hemorrhages.

Garis merah atau coklat pada bagian tersebut muncul akibat pecahnya pembuluh darah. Pendarahan terjadi karena adanya gumpalan kecil yang merusak pembuluh kapiler di bawah kuku.

3. Terdapat tonjolan (onychorrhexis)

Onychorrhexis adalah kondisi saat kuku menjadi rapuh dan pecah-pecah dan sering kali disertai dengan tonjolan vertikal.

Kondisi tersebut ditemukan pada pasien yang mengalami nyeri pada sendi seperti rematik.

Menurut penelitian yang diterbitkan dalam *Journal of Clinical Rheumatology* pada 2023, onychorrhexis disebutkan sering muncul pada pasien dengan tingkat peradangan yang tinggi.

4. Kuku melengkung (clubbing)

Mendeteksi rematik juga dapat dilihat dari kondisi bagian kuku yang mulai melengkung ke bawah. Kondisi ini biasa disebut dengan clubbing. Kondisi ini umum terjadi pada penderita rematik.

Clubbing disebabkan oleh peradangan dan proliferasi pembuluh darah kecil yang terjadi di bagian dasar kuku. Selain rematik, clubbing juga umum terjadi pada orang yang menderita ankylosing spondylitis yang merupakan merupakan penyakit peradangan sendi, terutama pada sendi tulang belakang.

5. Onikolisis

Onikolisis adalah kondisi saat kuku terpisah dari dasar kuku sehingga jadi menciptakan ruang kosong pada bagian bawah kuku.

Dilansir dari laman Health Central, kondisi tersebut terjadi ketika kuku secara bertahap terpisah dari dasar kuku di bawahnya sehingga meninggalkan bekas putih di bawah kuku.

Meski tidak menyebabkan rasa sakit, tapi celah yang terbentuk dapat menjadi tempat berkembang biaknya infeksi.

Itu tadi lima gejala rematik yang bisa dilihat melalui kuku. Jika mengalami hal tersebut, pastikan Anda segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memastikan penyakit yang dialami.

Selain gejala tersebut, penderita rematik umumnya juga kerap merasakan nyeri pada sejumlah bagian tubuh. Hal ini biasanya kerap menimbulkan rasa tidak nyaman sehingga bisa mengganggu aktivitas Anda.

Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk segera mengobatinya agar bisa melakukan aktivitas dengan nyaman.

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membantu mengobati nyeri akibat rematik adalah dengan mengoleskan obat pereda

nyeri yang mengandung zat anti-inflamasi, seperti metil salisilat atau ibuprofen.

Untuk diketahui, ibuprofen adalah obat anti-inflamasi nonsteroid (NSAID) yang berfungsi untuk menurunkan hormon penyebab peradangan dan rasa sakit di tubuh, termasuk rasa nyeri akibat rematik.

Oleh karena itu, mengoleskan obat pereda nyeri yang memiliki kandungan tersebut juga jadi salah satu langkah untuk mengatasi masalah rematik.

Bagi yang ingin mengatasi rematik menggunakan cara tersebut, NEO rheumacyl Anti-Inflammation IBP Gel bisa menjadi salah satu pilihan pereda nyeri yang punya kandungan Active Pro Formula dengan ibuprofen.

Berkat kandungan tersebut, NEO rheumacyl Anti-Inflammation IBP Gel dapat membantu meredakan nyeri, inflamasi akibat keseleo, cedera olahraga, dan rematik (Kompas)



REALME KENALKAN "ULTRA CLEAR CAMERA WITH AI"

REALME memperkenalkan teknologi "Ultra Clear Camera with AI" melalui smartphone yang akan segera hadir secara global, yakni realme 13 Pro Series 5G.

"Kini, masa depan fotografi bukan hanya tentang hardware saja. AI (kecerdasan artifisial) adalah ranah baru yang akan turut menentukan kualitas mobile photography di masa kini dan mendatang," ujar Head of Product Marketing realme Francis Wong. Hal itu disampaikan pada acara realme AI Imaging Media Preview yang diadakan di Bangkok, Thailand, Kamis (4/7).

Bertema "The Future is Here: AI is Revolutionizing Mobile Imaging", ajang ini mempertemukan para pemimpin dan pakar di industri untuk mengeksplorasi dampak transformatif AI pada teknologi kamera ponsel.

Melalui kolaborasi antara realme dan Sony, realme 13 Pro Series 5G nantinya akan melakukan debut sensor Sony LYT-701, menjanjikan kemajuan menarik dalam pengalaman fotografi yang semakin disempurnakan oleh AI Photography Architecture HYPERIMAGE+.

realme mengembangkan HYPERIMAGE+, arsitektur fotografi AI pertama di industri yang menghadirkan arsitektur tiga lapis yang meliputi optik kelas flagship, algoritma pemotretan AI pada perangkat, dan pengeditan gambar AI berbasis cloud.

HYPERIMAGE+ menghadirkan perpaduan optik terbaru yang terdiri dari sejumlah lensa, lensa periskop, dan sensor besar, menjadi landasan bagi solusi fotografi yang mampu

menghasilkan gambar berkualitas tinggi.

Menyempurnakan hal tersebut, algoritma pemrosesan gambar dan pengeditan gambar berbasis AI lebih lanjut memproses data gambar untuk meningkatkan kualitas visual konten foto dan video.

Pendekatan komprehensif baru ini diklaim membawa mobile photography ke tingkat yang lebih tinggi, memungkinkan pengguna menikmati kamera ultra jernih berbasis AI melalui sebuah ponsel.

Dengan dukungan arsitektur HYPERIMAGE+, realme 13 Pro Series 5G diposisikan sebagai ponsel dengan "Ultra Clear Camera with AI", menawarkan optik kelas flagship dan kemampuan AI yang menjanjikan pengalaman fotografi setara dengan kamera DSLR profesional.

realme 13 Pro+ 5G dilengkapi sistem kamera utama ganda, kamera utama 50MP OIS dengan Sony LYT-701 pertama di industri, dan kamera telefoto periskop 50MP dengan Sony LYT-600, mendukung 3x zoom optik. Sistem ini memungkinkan ponsel memberikan kualitas gambar optimal dalam berbagai skenario.

"Kolaborasi ini lebih dari sekadar teknologi, ini tentang memberdayakan semua orang untuk menangkap dan berbagi dunia mereka dengan cara yang belum pernah dibayangkan sebelumnya," kata Vice President of Sony Semiconductor Solutions (Shanghai) Limited Toshimitsu Kurosaka.

Dengan menghadirkan kemampuan AI pada pemrosesan gambar dalam domain RAW, Algoritma AI HyperRAW realme diklaim secara

signifikan meningkatkan kejernihan gambar dan rentang dinamis guna menangkap cahaya dan bayangan autentik dengan hasil nyata.

realme 13 Pro Series 5G juga menghadirkan serangkaian fungsi mumpuni, termasuk AI Pure Bokeh, AI Natural Skin Tone, dan AI Ultra Clarity.

Menjelang peluncuran yang akan datang, realme 13 Pro+ 5G juga telah menerima High Resolution Camera Certification oleh organisasi pengujian, inspeksi, dan sertifikasi pihak ketiga independen internasional, TÜV Rheinland.

Laporan GSM Arena, realme 13 Pro+ memiliki frekuensi CPU yang terdaftar di sertifikasi TENAA cocok dengan Snapdragon 7s Gen 2, bukan Snapdragon 7s Gen 3 yang lama dikabarkan akan didukung oleh perangkat tersebut.

Selain itu, Realme 13 Pro+ hadir dengan layar OLED beresolusi 1080x2412 dengan ukuran layar 6,7 inci.

Lalu untuk kameranya, ponsel ini mengusung konsep triple camera di bagian belakang terdiri dari kamera utama 50 MP dan dua kamera lainnya berukuran 8 MP dan 50 MP. Sementara untuk lini kamera swafotonya dibekali kamera 32 MP.

Dari sisi daya, ponsel pintar ini akan hadir dengan baterai 5.050 mAh dengan

dukungan pengisian cepat 80W.

Lalu dari sisi memori, untuk pemasaran di China ada banyak pilihan RAM serta ROM yang ditawarkan di antaranya untuk RAM terdiri dari 6/8/12/16GB.

Sementara untuk memori penyimpanan atau ROM tersedia dalam empat pilihan memori 128GB/256GB/512GB/1TB.

Perangkat ini berukuran 161,3 x 73,9 x 8,2 mm dan berat 190g. Dengan lebar dan ukuran layar itu, fakta bahwa ia memiliki layar sisi melengkung juga cukup banyak dikonfirmasi (Antara)





8 TIPS SEHAT AGAR PANJANG UMUR DAN SEHAT DI USIA TUA

MENGONSUMSI makanan sehat sangat baik bagi kesehatan tubuh. Menjaga pola makan juga merupakan salah satu bentuk investasi untuk mendapatkan tubuh sehat. Dilansir dari laman nhs.uk, Sabtu (6/7/2024) kunci makan sehat (diet) adalah orang yang mengonsumsi jumlah kalori yang tepat dapat menyeimbangkan energi yang dikonsumsi dengan energi yang digunakan.

Mengonsumsi berbagai macam makanan untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan juga merupakan hal penting yang perlu diperhatikan ketika menjalani diet. Berikut adalah 8 tips sehat praktis yang dapat dilakukan:

1. Konsumsi karbohidrat bertepung yang berserat tinggi sebagai makanan utama

Karbohidrat bertepung sebaiknya hanya memenuhi sepertiga dari makanan yang akan dikonsumsi. Karbohidrat ini meliputi kentang, roti, nasi, pasta, dan sereal.

Pilihlah jenis makanan yang mengandung serat lebih tinggi atau biji-bijian utuh, seperti pasta gandum utuh, beras merah atau kentang yang masih berkulit, karena mengandung lebih banyak serat dibanding karbohidrat bertepung putih atau

karbohidrat olahan sehingga dapat membantu seseorang merasa kenyang lebih lama.

2. Konsumsi banyak buah dan sayur

Tips sehat lainnya adalah disarankan untuk mengonsumsi setidaknya 5 porsi buah dan sayur setiap hari. Buah dan sayur dapat berupa buah dan sayur segar, beku, kalengan, kering, atau jus. Satu porsi buah dan sayur adalah 80g sedangkan satu porsi buah dan sayur kering (yang sebaiknya dikonsumsi saat sarapan, makan siang, dan makan malam) adalah 30g.

3. Konsumsi lebih banyak ikan, termasuk sebagian ikan berminyak

Konsumsi setidaknya 2 porsi ikan seminggu, termasuk 1 porsi ikan berminyak. Ikan berminyak kaya akan lemak omega-3, yang dapat membantu mencegah penyakit jantung. Jika memilih kaleng, ingatlah bahwa ikan kaleng memiliki kadar garam yang tinggi.

4. Kurangi lemak jenuh

Terdapat 2 jenis lemak utama: lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh dapat ditemukan pada

makanan seperti potongan daging berlemak, mentega, kue, dan juga biskuit. Bila mengonsumsi daging, pilihlah potongan daging tanpa lemak dan singkirkan lemak yang terlihat.

Pria tidak boleh mengonsumsi lebih dari 30 gram lemak jenuh per hari, sedangkan wanita tidak boleh mengonsumsi lebih dari 20 gram lemak jenuh per hari. Anak-anak di bawah usia 11 tahun harus mengonsumsi lebih sedikit lemak jenuh daripada orang dewasa.

5. Kurangi konsumsi garam: tidak lebih dari 6 gram per hari untuk orang dewasa

Mengonsumsi terlalu banyak garam dapat meningkatkan tekanan darah. Orang dengan tekanan darah tinggi lebih mungkin terkena penyakit jantung atau stroke dibanding mereka yang tidak. Penting untuk diingat bahwa sekitar tiga perempat garam yang Anda makan sudah ada dalam makanan saat Anda membelinya, seperti sereal, sup, roti, dan saus.

6. Jangan lewatkan cairan tubuh

Pastikan untuk mengonsumsi banyak cairan demi mencegah dehidrasi. Dianjurkan untuk minum 6 hingga 8 gelas setiap hari. Jumlah ini

merupakan tambahan cairan yang diperoleh dari makanan yang dikonsumsi.

7. Jangan lewatkan sarapan

Beberapa orang melewatkan sarapan karena berpikir bahwa hal tersebut akan membantu mereka menurunkan berat badan. Namun sarapan sehat yang tinggi serat dan rendah lemak, gula, dan garam dapat menjadi bagian dari diet seimbang, serta dapat membantu mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk kesehatan tubuh.

8. Kurangi Gula

Makanan dan minuman manis juga seringkali mengandung banyak energi, dan jika dikonsumsi terlalu sering dapat menyebabkan penambahan berat badan. Makanan dan minuman manis juga dapat menyebabkan gigi berlubang, terutama jika dikonsumsi di antara waktu makan.

Gula bebas adalah gula yang ditambahkan ke makanan atau minuman, atau ditemukan secara alami dalam madu, sirup, minuman manis bersoda, dan jus buah serta smoothie tanpa pemanis. Gula tersebut adalah jenis gula yang harus dikurangi, dibanding gula yang ditemukan pada buah dan susu (Lenteratoday)

Hedon hingga Asusila ... (dari Hal 1)

MANTAN Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD turut menyoroti kasus pemberhentian eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam sebuah unggahan di media soMenurut dia, KPU saat ini sudah tidak layak untuk menggelar tahapan Pilkada Serentak 2024. Hal itu ia sampaikan dalam akun X pribadinya @mohmahfudmd. "Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia," tulis Mahfud dilihat, Senin (8/7/2024).

Mahfud merasa miris melihat kelakuan pimpinan KPU yang memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Ia mendesak ada langkah nyata dari pemerintah dalam mereformasi KPU, karena di matanya tidak ada satupun komisioner yang pantas untuk dipercaya.

"Setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," tuturnya.

Ia menyarankan perlu adanya pergantian seluruh komisioner KPU tanpa menunda gelaran Pilkada mendatang.

"Ada vonis MK No.80/PUU-IX/2011 yang isinya 'jika komisioner KPU mengundurkan diri maka tidak boleh ditolak atau tidak boleh digantungkan pada syarat pengunduran itu harus diterima oleh lembaga lain' ini mungkin jalan yang baik jika ingin lebih baik," tuturnya.

"Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK soal Pilpres dan Pilleg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat," ujar Mahfud.

Plt Ketua KPU Sebut Sewa

Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, mengucapkan terima kasih kepada Mahfud MD, dia menilai kritikan tersebut sebagai masukan kepada lembaganya.

"Tapi pada intinya kami memahami itu sebagai ungkapan rasa sayang ke semua proses demokratisasi yang melibatkan penyelenggara. Apa yang menjadi perhatian para pihak itu pasti akan menjadi perhatian kami, ya tentu kami perbaiki yang kurang," kata Afifuddin di Hotel Gran Melia, Jakarta pada Senin (8/7/2024).

Dia mengatakan KPU bakal mempertahankan apa yang dinilai baik dan meninggalkan yang buruk. "Jadi kami melihatnya sebagai kritik sekaligus pengingat bahwa kami semua harus profesional serta menjaga integritas dari semua jajaran menjelang pelaksanaan Pilkada," tuturnya.

Afifuddin menyebut soal mobil dinas, komisioner mendapatkan fasilitas 2 saja. "Satunya kan mobil lama ya tidak semua dipakai. Nanti teman-teman Kesekjenan bisa menjelaskan," ujarnya.

Afif tak membantah hal tersebut dan hanya menegaskan bahwa salah satu mobil tidak selalu dipakai. "Statusnya sewa," kata Afif, Senin (8/7/2024).

"Yang pasti sih mobil dinas itu dua, satu (lainnya) mobil lama. Dua ya yang nempel di kita, satunya mobil lama yang pelat merah itu yang itu bisa dipakai jajaran yang lain," ujar dia.

Menurutnya, dia pernah menanyakan soal fasilitas jangan sampai melanggar aturan. Afifuddin tidak menjawab soal kritik jet pribadi yang dipakai untuk ke tempat asusila. Menurutnya fasilitas jet dipakai untuk kebutuhan penyediaan logistik Pemilu 2024 lalu.

"Selama itu dilakukan untuk mendatangi tempat-tempat yang susah dijangkau karena waktu sangat mepet. Pertaruhannya kan kalau barang tidak bisa terkirim dan seterusnya," ujarnya.

Afifuddin mengaku tidak paham soal tuduhan pemakaian jet pribadi untuk ke tempat asusila. "Kalau soal yang berkaitan dengan putusan DKPP sekali lagi saya tidak mengomentari hal-hal yang sifatnya bukan kelembagaan," ujar dia.

Afifuddin menepis komisioner KPU mendapat fasilitas 3 mobil mewah.

"Dua (mobil) yang nempel di kami. Satunya mobil lama pelat merah itu yang bisa dipakai jajaran lain," ujarnya.

Menurut pantauan, satu mobil lama adalah Mitsubishi Pajero. Para komisioner KPU RI 2022-2027 sangat jarang terlihat menunggangi mobil ini.

Fasilitas mobil berikutnya adalah Hyundai Palisade yang banyak digunakan pada 2023. Sementara itu, memasuki 2024, sejumlah komisioner KPU RI terlihat sering menggunakan Toyota Alphard.

Secara individu berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2023, kekayaan Hasyim mencapai Rp9 miliar, di mana sebagian besar berasal dari koleksi mobil mewah dan sepeda motor yang dimilikinya.

Salah satu mobil mewah dalam koleksi Hasyim adalah Toyota Prado tahun 2006 yang dilaporkan memiliki nilai Rp150 juta. Mobil ini dilengkapi dengan mesin diesel common rail berkapasitas 2.982cc dengan turbo, yang menghasilkan tenaga 168 dk dan torsi 410 Nm.

Selain Toyota Prado, Hasyim juga memiliki Nissan Serena tahun 2014. Mobil MPV dengan pintu geser ini ditaksir bernilai Rp150 juta. Nissan Serena dikenal sebagai mobil keluarga yang nyaman dan praktis untuk digunakan sehari-hari.

Tidak hanya mobil, Hasyim juga memiliki dua unit sepeda motor di garasinya. Pertama, Vespa PX150 tahun 1985 yang dinilai seharga Rp20 juta. Kedua, Honda Spacy tahun 2011 yang dilaporkan bernilai Rp4 juta.

Terpisah, Pengamat politik Dr. Vita Novianti, SP, M.AP, menilai pemberhentian tetap Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari tidak mempengaruhi tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 yang akan tetap berjalan sesuai regulasi dan proses yang ada.

"Tahapan Pilkada Serentak 2024 sudah berjalan, pemberhentian tetap Ketua KPU RI sama sekali tidak berpengaruh terhadap proses tahapan pilkada," ujarnya di Situbondo, Jawa Timur.

Mantan komisioner KPU tahun 2009-2014 ini menjelaskan bahwa komisioner KPU bersifat kolektif kolegial dan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak dibebankan kepada seorang ketua.

"Jadi, KPU ini kolektif kolegial, keputusan KPU berdasarkan pleno dan bukan ketua. Kuorum 2/3 dari jumlah anggota yang ada sudah bisa membuat keputusan," ucap Dosen Fisip Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo itu.

Senada juga disampaikan Ketua KPU Kabupaten Situbondo Hadi Prayitno. Menurutnya, tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur tetap berjalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

"Sampai dengan hari ini, tahapan pilkada terus berjalan. Petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih juga sudah bekerja melakukan pendataan," katanya.

Hadi menjelaskan, petugas pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih dengan mencocokkan data yang tercantum data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dengan Kartu Keluarga (KK) dan KTP elektronik pemilih.

"Laporan yang kami terima pelaksanaan coklit sudah mencapai sekitar 50 persen, dan petugas pantarlih masih ada waktu bekerja sampai dengan 24 Juli mendatang," katanya.(wid,ant,tro,ist/dya)

TINGGAL SIAPA KOMISIONER KPU SAAT INI?

1. Betty Epsilon Idroos

Betty Epsilon Idroos, lahir di Medan pada 22 Maret 1979, adalah Anggota KPU RI periode 2022-2027. Ia menamatkan pendidikan di Medan dan melanjutkan studi di Institut Pertanian Bogor, lulus pada 2003, dan meraih gelar Pasca Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Indonesia pada 2008. Karier kepemilihannya dimulai di KPU Provinsi DKI Jakarta, menjadi anggota (2013-2018) dan Ketua (2018-2022). Betty juga pernah menjadi Tenaga Ahli Komisi II DPR RI dan terlibat dalam proyek UNDP Media Center KPU RI.

2. Mochammad Afifuddin

Mochammad Afifuddin, lahir 1 Februari 1980 di Sidoarjo, aktif dalam organisasi sejak kuliah, termasuk sebagai Presiden Mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2000-2001) dan anggota PMII. Lulus S1 dari UIN Syarif Hidayatullah (2004) dan meraih Magister Manajemen Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia (2007). Afif memulai karier kepemilihannya sebagai relawan pada Pemilu 1999, menjadi Koordinator Nasional JPPR (2013-2015), dan mengajar di FISIP UIN Syarif Hidayatullah (2015-2017). Ia menjadi anggota Bawaslu RI pada 2017, memimpin Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar-lembaga. Kini, ia adalah Anggota KPU RI periode 2022-2027 dan sementara menggantikan Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU.

3. Parsadaan Harahap

Parsadaan Harahap, lahir di Medan pada 17 Juli 1972, saat ini adalah Anggota KPU RI periode 2022-2027. Ia menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Medan dan meraih gelar S1 Agronomi (1999) serta S2 Ilmu Administrasi (2011) dari Universitas Bengkulu. Karier kepemilihan Parsadaan dimulai sebagai Anggota KPU Provinsi Bengkulu (2003-2012) dan kemudian Ketua KPU Provinsi Bengkulu (2011-2012). Selanjutnya, ia menjabat sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu (2012-2022).

4. Yulianto Sudrajat

Yulianto Sudrajat, lahir di Yogyakarta pada 22 Juli 1969, adalah Anggota KPU RI periode 2022-2027. Ia menamatkan pendidikan dasar hingga menengah di Yogyakarta, meraih gelar Sarjana Hukum dari UII Yogyakarta (1994) dan Magister Hukum dari UGM (2006). Karier kepemilihan Yulianto dimulai sebagai Anggota KPU Kota Yogyakarta (2003-2018). Selama kuliah, ia juga menjabat sebagai Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Hukum UII.

5. Idham Holik

Idham menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Karawang sebelum meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam 45 Bekasi (2000), Magister Ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia (2004), dan Doktor Ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia (2015) dengan IPK 3.93. Karier kepemilihannya dimulai sebagai Komisioner KPU Kabupaten Bekasi (2003-2013), Ketua KPU Kabupaten Bekasi (2013-2018), dan Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat (2018-2022). Saat ini, Idham menjabat sebagai Anggota KPU RI periode 2022-2027.

6. August Mellaz

August Mellaz, lahir di Surabaya pada 25 Agustus 1976, adalah Anggota KPU RI periode 2022-2027. Ia menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Surabaya, meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (2001), dan Pasca Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Nasional (UNAS). Sebelum bergabung dengan KPU RI, August pernah menjadi Anggota Tim Kajian di Dewan Pertimbangan Presiden (2021) dan Anggota Bidang Politik di Kemenko Polhukam (2019). Ia juga terlibat dalam penyusunan dan penelitian berbagai naskah akademik serta peraturan kepemilihan di Indonesia.



DPRD SURABAYA SOROTI PEMBLOKIRAN KARTU KELUARGA

RENI ASTUTI: JANGAN SAMPAI MERUGIKAN HAK WARGA

SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti menyoroti kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang melakukan penonaktifan atau pemblokiran Kartu Keluarga (KK). Diketahui, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sedikitnya 42.804 KK dengan 97.408 jiwa masuk daftar terancam diblokir. Ini akibat warga yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya atau tak sesuai domisili.

Reni menegaskan, kebijakan tersebut jangan sampai menhanguskan hak administrasi masyarakat. "Administrasi kependudukan itu adalah hak warga, secara UU sudah jelas. Yang memenuhi adalah pemerintah, dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan itu," katanya, Senin (8/7/2024).

Dia mengusulkan pemblokiran KK harus tersampaikan dengan jelas, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran atau kegelisahan pada warga.

Reni mengungkapkan, sebelum melakukan pemblokiran KK, Disdukcapil harus mengedepankan prinsip bila hak administrasi kependudukan warga Surabaya wajib dijamin pemerintah. Sehingga ketika ada pemutakhiran data, tidak me-



Barti Nurullaily (71) atau akrab dipanggil Mbah Nurul (kanan) saat mengadu ke Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti Senin (8/7/2024), soal KK-nya yang diblokir Disdukcapil Surabaya. (ist)

nimbulkan persoalan pada layanan primer masyarakat. Diantaranya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

"Rencana Pemerintah Kota Surabaya mengusulkan beberapa KK untuk diblokir ke Kementerian Dalam Negeri, saya meminta jangan sampai menimbulkan persoalan baru atau malah menghalangi warga untuk mendapatkan pelayanan primer, baik itu di bidang pendidikan atau di bidang kesehatan," tegas Reni.

Meski demikian, Reni menghormati rencana Pemkot Surabaya melakukan perbaikan ataupun pe-

nertiban administrasi kependudukan di Kota Surabaya. Sebab dengan begitu program dan intervensi bisa tepat saran.

Sementara terkait tenggang waktu yang diberikan pemkot agar warga melakukan verifikasi hingga 1 Agustus juga harus dipastikan betul. Dalam hal ini, pemkot harus meriview atau mengupdate data tersebut secara berkala dan wajib disampaikan ke masyarakat.

"Yang belum terdeteksi berapa, itu harus dipastikan betul. Jangan langsung diblokir. Lalu yang diblokir

kriterianya seperti apa, itu harus tersampaikan dengan detail. Data juga harus diupdate," tuturnya.

Tak hanya itu, Reni juga meminta agar pemkot mendekatkan pelayanan ke masyarakat dengan cara membuat desk pengaduan di setiap Kelurahan.

"Apalagi pemkot bicara pelayanan publik itu terdepan dan kita punya prestasi di bidang itu, per kelurahan harus ada desk pengaduan. Bahkan ke tingkat RW, sehingga dibuat cepat dan mudah. Efisiensi pelayanan juga perlu," tegasnya.

Di sisi lain, ia juga meminta kepada masyarakat yang masuk dalam daftar blokir agar proaktif untuk melakukan verifikasi data.

"Sebelum KK diusulkan diblokir itu harus berlapis verifikasinya. Sampaikan dulu ke warga berapa data yang belum diverifikasi. Warga juga kalau bisa proaktif jika memang dia masuk dalam daftar pemblokiran. Jadi petugas pelayanan dan masyarakat harus proaktif," ucapnya. (ADV, ama/dya)



Rencana Pemerintah Kota Surabaya mengusulkan beberapa KK untuk diblokir ke Kementerian Dalam Negeri, saya meminta jangan sampai menimbulkan persoalan baru atau malah menghalangi warga untuk mendapatkan pelayanan primer, baik itu di bidang pendidikan atau di bidang kesehatan."



RENI ASTUTI
WAKIL KETUA DPRD KOTA SURABAYA,

Di Depan Reni Tangis Mbah Nurul Pecah, Tak Dapat Layanan Kesehatan karena KK Diblokir

SURABAYA- Air mata Barti Nurullaily (71) atau akrab dipanggil Mbah Nurul tak bisa dibendung saat mengadu Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti.

"Nenek kelahiran Surabaya, 2 Agustus 1953 ini menerima kenyataan pahit kalau KK miliknya diblokir oleh Pemkot Surabaya.

KK warga yang tinggal di Manukan Lor, Kelurahan Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes ini tak lagi aktif sejak sebulan yang lalu.

"Waktu itu mau berobat karena sakit. Tapi diwarah mboten saget terose KK ne sudah tidak aktif (Jawa: Tapi diberitahu tidak bisa, katanya KK saya sudah tidak aktif). Saya ke kelurahan, katanya KK saya kena blokir," ucap Mbah Nurul saat ditemui, Senin (8/7/2024).

Nurul mengaku tak tahu apa penyebab KK hingga diblokir. Padahal sejak lahir, ia tinggal dan ber-KTP Surabaya. Sehari-hari Nurul tinggal di rumah kontrakannya Jalan Manukan

Lor bersama anak perempuannya dan satu cucu.

Ia menduga, terblokirnya KK miliknya hanya karena pindah kontrakan. Padahal lokasi kontrakan-nya masih di kelurahan yang sama. Namun KK Nurul tetap saja terblokir.

"Saya kurang jelas. Menurut keterangan karena saya tidak bermisili di alamat KK saya. Pindah di gang sebelahnya juga nggak bisa," katanya.

Nurul pun berharap, dengan mengadu ke DPRD Kota Surabaya agar menemukan solusi terbaik, terutama agar KK yang sebelumnya terblokir bisa dibuka kembali.

"Ya mudah-mudahan, pemerintah itu juga bisa meyakinkan masyarakat seperti saya. Walaupun saya penduduk Surabaya, tapi kalau tidak punya uang gimana solusinya untuk administrasi negara," ungkap Nurul.

Sementara itu, Reni Astuti langsung mendampingi Mbah Nurul ke Disdukcapil untuk mendapatkan

solusi. "Yang penting sudah ada solusinya. Jadi bisa dibuatkan kejelasannya, kalau ada masalah gini solusinya seperti apa. Nanti surat-surat yang dibutuhkan bisa dibantu kelurahan juga," ujar Reni di Disdukcapil Surabaya.

"Pemkot Surabaya tidak boleh gegabah untuk memblokir KK. Setahu kami, belum ada pemblokiran. Sampai Agustus baru verifikasi dan klarifikasi," reaksi Reni.

Terkait pemblokiran KK ini, DPRD juga siap menerima aduan dari masyarakat dan siap membantu mencari solusi.

"Jangan sampai kemudian hari diketahui salah blokir sehingga ada hak masyarakat yang tidak terpenuhi. Saya minta pemkot bisa menyampaikan secara berkala datanya dari 42 ribu tersebut, berapa yang sudah mengonfirmasi. Kalau benar-benar sudah tidak ada konfirmasi, baru bisa diusulkan dalam blokir," jelasnya. (ADV, ama/dya)